

## Polres Jaksel Dirikan 15 Pos Pengamanan

JAKARTA (IM) - Polisi mendirikan pos pengamanan Lebaran 2021 di kawasan Jakarta Selatan. Pendirian pos pengamanan ini dalam rangka Operasi Ketupat Jaya 2021.

Setidaknya, ada 15 pos pengamanan yang didirikan di wilayah Jakarta Selatan.

"Dahulu hanya ada delapan Pos PAM, tapi sekarang ditambah menjadi 15 Pos PAM," ujar Kabag Ops Polres Jakarta Selatan, Kompol Ridwan R Soplanit pada wartawan, Kamis (6/5).

Menurutnya, penambahan Pos PAM itu dilakukan mengingat situasi saat ini sedang pandemi. Maka itu, selain pengamanan lalu lintas, pusat perbelanjaan, pertokoan dan perkantoran,

sejumlah titik yang dianggap rawan atau berpotensi menimbulkan keramaian pun dilakukan pengamanan. "Maka itu, penting untuk melakukan pemantauan-pemantauan di sejumlah titik terkait protokol kesehatan," tuturnya.

Adapun belasan Pos PAM yang didirikan tersebut, diantaranya ada di kawasan ITC Fatmawati, Bundaran Bulungan, sekitar Stasiun Manggarai, Mall Kokas, sekitar Flyover Tendean, Mall Citos, Pasar Pondok Lanu. Kawasan Apartemen Kalibata City, sekitar Pancoran, Taman Margasatwa Ragunan, Pasar Lenteng Agung, Mall Gandaria City, Mall Pondok Indah, Pasar Cipulir, dan kawasan Veteran Pesanggrahan. ● lus

## Pengemudi Mobil dari Negara "Kekaisaran Sunda Nusantara" Alami Gangguan Psikis

JAKARTA (IM) - Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Akmal menyebutkan pengemudi mobil Negara Kekaisaran Sunda Nusantara yang diamankan di Tol Dalam Kota Cawang, Rabu 5 Mei 2021 kemarin, 'RK', mengalami halusinasi atau gangguan psikis.

"Iya kejiwaannya ya. Ini kan halusinasi (halusinasi) aja. Ini yang masih kita dalam karena ya bisa saja orang ini (RK) mengalami gangguan psikis menganggap ada negara dalam negara," ujar Akmal, Kamis (6/5) ketika dikonfirmasi awak media.

Akmal mengungkap terkait dua orang yang ada di dalam mobil saat ini sudah dipulangkan, namun kasusnya masih akan dialami lebih lanjut.

"Dua orang yang ada di dalam kendaraan tersebut sudah dipulangkan kemarin tapi statusnya masih pendalaman," tambah Akmal.

Sebelumnya, pengemudi kendaraan dengan plat anbu SN-45-RSD berwarna biru berinisial 'RK' melintas di Tol Dalam Kota Cawang pada Rabu (5/5) pukul 11.00 WIB. Setelah diamankan, polisi

mengungkapkan kendaraan tersebut sejatinya memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) asli B-8462-BP.

Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyebutkan saat diamankan petugas, pengemudi berinisial RK tersebut tidak mau dan tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan maupun SIM yang sah.

"Kita sita kendaraannya, kita cari asal-usul kendaraan tersebut. Dari nomor mesin dan nomor rangka terdaftar di Polda Metro Jaya. Nomor plat asli kendaraan tersebut yakni B-8462-BP," ujar Sambodo Purnomo Yogo, Rabu (5/5) di Mapolda Metro Jaya.

Kompol Akmal mengatakan, pihaknya tengah mendalami dokumen STNK dan SIM Negara Kekaisaran Sunda Nusantara yang dimiliki RK.

"Kalau kemarin kita tanya mereka bilang bikin sendiri lalu mengklaim itu bisa jadi dokumen untuk kenderaannya dia. Tapi itu buat sendiri karena beda-beda ada yang pangkatnya bintang 2. Bintang dua suka-suka mereka saja yang buat," ujar Akmal, Kamis (6/5). ● lus

# 12 | PoliceLine

FOTO/ANT



## RILIS KASUS UANG PALSU

Kapolresta Banyuwangi Kombes pol Arman Asmara Syarifuddin (kedua kanan) menunjukkan barang bukti uang palsu beserta tersangkanya di Mapolresta Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (6/5). Polisi berhasil menangkap pelaku pembuat uang Rupiah palsu yang dilakukan dengan cara membelah dua bagian uang asli lalu menempelkan dengan uang palsu sehingga bagian depan uang asli dan belakang uang palsu maupun sebaliknya dengan total 48 juta.

## HARI PERTAMA LARANGAN MUDIK

# 725 Kendaraan Diminta Putar Balik di GT Cikarang Barat dan Cikupa

Sebanyak 233 kendaraan pribadi, 84 kendaraan umum disuruh putar balik dari GT Cikarang Barat dan dari GT Cikupa 359 kendaraan pribadi, 49 angkutan umum.

JAKARTA (IM) - Ditlantas Polda Metro Jaya mulai melaksanakan aturan larangan mudik Lebaran 2021. Hari pertama larangan mudik, Kamis (6/5) pukul 00.00 WIB, sejumlah kendaraan kena jaring. Dirilantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, dari pukul 00.00 - 05.00 WIB, pihaknya sudah menjangkit 725 kendaraan yang melakukan kegiatan melintas di dua Gerbang Tol (GT), Cikarang dan Cikupa. "Petugas kami telah melakukan penindakan putar balik kendaraan sebanyak 317 unit di Gerbang Tol (GT) Cikarang Barat dengan rincian 233 kendaraan pribadi dan 84 kendaraan umum," ujar Sambodo Purnomo Yogo.

## OMZET HINGGA MILIARAN RUPIAH

# Polda Jateng Ungkap Penjualan Alat Rapid Test Antigen Ilegal

SEMARANG (IM) - Jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng) mengungkap penjualan alat rapid test antigen ilegal dengan omzet hingga miliaran rupiah. Disebut ilegal karena alat test rapid antigen yang dijual tersangka SPM (34) tidak memiliki izin edar.

Menurut polisi, SPM telah memasarkan alat rapid test antigen ilegal sejak Januari lalu di kawasan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

"Kita dapatkan informasi adanya masyarakat yang menggunakan rapid tes tanpa izin edar," kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi saat rilis kasus di Ditkrimsus Polda Jateng, Semarang, Rabu (5/5).

Untuk mengungkap aksi SPM, polisi lalu melakukan undercover buy atau berpura-pura menjadi pembeli. Dari situ, didapati kurir yang membawa 25 boks yang masing-masing berisi 25 alat tes tanpa izin edar.

"Sebanyak 450 pack kita amankan, pelaku mencari keuntungan. TKP di wilayah Genuk Semarang," jelas Luthfi.

Tiga merek alat tes rapid antigen yang diduga tanpa izin

edar tersebut adalah 'Clungene', 'Hightop', dan 'Speedcheck'. Selain itu ada juga beberapa benda yang tidak memiliki izin edar seperti pulse oximeter, oximeter IP22, dan 59 pack masing-masing berisi 100 pes stik swab.

Luthfi menyebut penjualan rapid test ilegal ini berlangsung sejak Oktober 2020 hingga Februari 2021. Dalam waktu 1-2 minggu, pelaku bisa menjual 300-400 boks alat tes rapid antigen.

"Dia melakukan aksinya dengan meraup keuntungan Rp 2,8 miliar. Dia lebih murah karena tidak punya izin edar. Diedarkan di wilayah Jateng, di masyarakat umum biasa, klinik dan rumah sakit. Merugikan tatanan kesehatan," tegas Luthfi.

Dirkrimsus Polda Jateng, Kombes Johanson Ronald Simamora, menambahkan, pelaku merupakan distributor dan sales wilayah Jawa Tengah. Dia memiliki rekanan di Jakarta sebagai kantor pusat yang mendistribusikan barang-barang itu ke area Jateng.

"Dia distributor, sales, mencari pasar. Ada pasar dia meng-

hubunginya Jakarta, kemudian didistribusikan ke sini, wilayah Jateng ada Pekalongan, Semarang dan luar daerah," jelas Johanson.

Johanson memastikan bakal menetapkan pimpinan perusahaan tempat pelaku bekerja sebagai tersangka dalam kasus ini. Terlebih, penjualan alat kesehatan (alkes) ilegal ini dinilai merugikan masyarakat luas.

"Kemungkinan rencana dirut akan ditetapkan jadi tersangka. Kita betul-betul concern pada masalah alkes," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, tersangka SPM beralih sedang mengajukan izin edar. Namun, dia mengaku nekat menjual produk tersebut karena tergiur keuntungannya.

Atas perbuatannya, SPM dijerat pasal 197 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana diubah dalam pasal 60 angka 10 UU Cipta Kerja dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. Kemudian untuk UU perlindungan konsumen ia dijerat dengan pasal 62 ayat 1 dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. ● lus

nya anggota polisi lalu lintas yang jumlahnya tidak sedikit.

"Jumlah polisi lalu lintas saja sekitar 1.300, lalu lintas tok, yang tugasnya nyegat, ngatur dan peniksa," ungkapnya.

Selain dikerahkan, polisi lalu lintas menurutnya tenaga pendukung dan personel pendukung juga akan membantu pada titik-titik penyekekatan. Personel pembantu tersebut yakni dari anggota Sabhara, TNI, Pomdam, Dishub, Sat Pol PP, dan Kesehatan. "Belum lagi dari anggota Sabhara, dari TNI, Pomdam, Dishub, Satpol

PP dan kesehatan, itu tenaga pendukung. Seperti misalnya di cikarang barang anggota polisinya sekitar 200 tenaga pendukungnya sekitar 300," tegasnya.

Imran mengatakan, pengerahan anggota yang banyak ini nantinya diharapkan mampu menjaga penyekekatan secara bergantian. Hal ini untuk menghindari adanya anggota yang kelelahan. "Jadi kita bisa menghindari kelelahan anggota dan yang kedua bisa menjaga anggota dalam kondisi yang prima," tegasnya. ● lus

## Tak Punya SIKM, Ibu-ibu di Surabaya Berdebat Ketika Disuruh Putar Balik

SURABAYA (IM) - Aturan pemerintah yang melarang mudik mulai diberlakukan sejak Kamis (6/5). Ribuan kendaraan yang masuk Kota Surabaya, diperiksa satu-persatu oleh petugas kepolisian, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya di pintu masuk Bundaran Waru Surabaya.

Pengendara yang tidak bisa menunjukkan Surat Izin Keterangan Masuk (SIKM) tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan harus putar balik. Salah seorang ibu-ibu protes ke Polwan yang memeriksa kendaraannya, karena tidak bisa menunjukkan surat SIKM namun menunjukkan surat PBB sehingga pengendara dan Polwan terlibat adu mulut.

"Aturannya membingungkan, saya kesel dengan aturan penyekekatan tersebut," ujar Damayanti, pengendara yang terlibat adu mulut dengan petugas.

Sementara itu, Polrestabes Surabaya terus melakukan penyekekatan dan pemeriksaan kendaraan yang dari luar kota. Bagi yang tidak bisa menunjukkan surat izin keterangan masuk, maka harus putar balik karena aturan tersebut telah diberlakukan seluruh Indonesia. Hal ini untuk mengantisipasi adanya arus mudik Lebaran untuk mengantisipasi adanya penyebaran Covid-19.

"Siang ini, Kamis (6/5) penyekekatan terus dilakukan hingga setelah lebaran, yakni sampai tanggal 17 Mei mendatang," kata Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Teddy Candra. ● lus

## Penyebarkan Hoaks Genosida Warga Papua di Facebook Ditangkap

JAKARTA (IM) - Polisi menangkap pelaku penyebar hoaks tentang genosida warga Papua melalui Facebook. Pelaku diketahui menyebarkan ujaran kebencian itu pada 20 April 2021 lalu.

"Bijaklah dalam bermain media sosial, mari berfikir positif dalam bingkai NKRI," ucap Kasatgas Humas Nemanakawi, Kombes Pol Iqbal Al Qudussy atas keprihatinan penangkapan warga yang menebarkan hoaks di Papua dalam keterangannya, Kamis (6/5).

Akun Facebook Enago Womaki yang dimiliki oleh Harun Gobai memposting "Seluruh orang PAPUA yg ada di PAPAN soring sampai merauke hati2 ke luar masuk karna kita org PAPAN itu pandangan Negara NKRI dalam bal TNI/POLRI, BIN BAI, KOPASUS dll pandangan mereka kita itu semua TPNPB/OPM karna alasan tujuan mereka semua OAP yg ada di PAPAN musnakan/habisakan diatas tananya sendiri."

Sehingga, Satgas Siber Ops Nemanakawi menangkap pemilik akun Facebook Enago Womaki. Pemilik akun tersebut bernama Harun Gobai itu ditangkap di Mess Ridje Camp Barak U PT Preport Mile 72 Tembaga, Kabupaten Mimika, Papua.

Tidak hanya itu, pelaku juga diketahui menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian lainnya pada 2020 lalu dengan menyebutkan otonomi khusus Papua akan berakhir dengan kekerasan.

"Negara Indonesia di berikan OTONOMI KUSUS (otsus) PAPAN tahun 2001-2021 suda berakir dg semua kekerasan, intimidasi, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dll sebab Negara

indonesia tdk mampu selesaikan selama massa OTONOMI KUSUS (otsus) yg dibuat HAM di papua karna negara indonesia tdk bisa diselesaikan perbuatannya," tulisnya.

"Negara indonesia punya Hukum UUD tidak berkemasa karna bisa dibayar dg rupiah untuk itu Negara indonesia yg lakukan selama 19 tahun massa otsus indonesia lakukan.Intimidasi, Pembunuhan, Pemerkosaan, Penjarakan, dan Penganiayaan.

"Yg dibuat tanpa syarat yg benar atan tidak sesuai Hukum UUD itu suda berlalu karna indonesia tdk mampu selesaikan bagian HAM RI Internasional utk itu kami masyarakat bersama pemerintah provinsi papua & papua barat bersama DPRD PAPAN & PAPAN BARAT, MRP PAPAN & PAPAN BARAT, setiap bupati kb kota PAPAN & PAPAN BARAT minta Negara indonesia harus tarik kembali tahun 2021 kami masyarakat PAPAN tidak mau dg efaluasi dll," sambungnya.

Kombes Iqbal mengatakan, Polri akan terus melakukan penegakan hukum terhadap akun-akun provokasi yang menimbulkan kebencian, permusuhan berdasarkan SARA.

"Saat ini tersangka ke Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap barang bukti dan berkoordinasi dengan Pengacara tersangka serta para ahli," kata Iqbal.

Pelaku dijerat dengan pelanggaran tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana tertuang dalam pasal 4A ayat (2) jo pasal 28 ayat 2 UU No 19 thn 2016 tentang perubahan UU no 11 thn 2008. ● lus

FOTO/ANT



PENYEKATAN PENGENDARA DI TOL MERAK Petugas kepolisian mendata pengendara motor yang akan menuju Sumatera melalui Pelabuhan Merak di kawasan pintu Gerbang Tol Merak, Banten, Kamis (6/5) dini hari. Pemeriksaan tersebut terkait larangan mudik lebaran 2021 yang dimulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei sebagai upaya mengantisipasi risiko peningkatan kasus penularan COVID-19 jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

## Aiptu Tomy Target Takjil Sianida Diperiksa Propam Polda DIY

SLEMAN (IM) - Kasus takjil mengandung sianida yang dikirim Nani Apriyani Nurjaman (25) dan menewaskan bocah anak driver ojol di Bantul, memasuki babak baru. Aiptu Tomy, anggota Polresta Yogyakarta, yang menjadi target awal sate beracun itu kini diperiksa oleh Propam Polda DIY.

"T (Tomy), bahwa yang bersangkutan sedang kami dalam keterangannya, kami periksa. Diperiksa oleh Propam Polda DIY," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Yuliyanto saat ditemui wartawan di Mapolda DIY, Kamis (6/5).

Yuli menjelaskan pemeriksaan sudah dilakukan sejak munculnya isu pernikahan siri Aiptu Tomy dengan Nani dalam kasus takjil sianida ini. "Setelah ada berita atau isu itu sudah dilakukan pemeriksaan," jelasnya.

Nantinya, kata Yuli, kalau terbukti Tomy melakukan pelanggaran maka Polda akan memberikan tindakan yang tegas.

"Jadi kami masih terus memeriksa untuk mengumpulkan bukti-bukti yang selama ini di perbincangan. Apakah benar atau tidak? Apakah itu melanggar atau tidak? Nanti dari Propam yang akan menindaklanjuti," sebutnya.

Soal sanksi, ia menyebutkan masih menunggu hasil pemeriksaan dari Propam. Hingga saat ini, Yuli belum

mengetahui pasal apa saja yang dilanggar.

"Makanya begini, penyidik, penyidik dari Propam ini kan memeriksa para pihak, saksi-saksi nanti dicari unsur pasal mana yang dilanggar. Nanti akan ditentukan oleh penyidik dan penyidik. Sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi pasal yang dilanggar," urainya.

"Sekali lagi saya sampaikan, siapa pun anggota yang melakukan pelanggaran baik etik maka akan kita lakukan penindakan sesuai dengan prosedur," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Nani ditangkap polisi gegara meracik dan mengirim takjil sianida yang menewaskan seorang bocah anak driver ojek online (ojol) di Bantul. Paket sate beracun itu sebenarnya dikirim Nani untuk Tomy yang belakangan terungkap bahwa Tomy dan Nani disebut sudah menikah. Nani menipiskan takjil sianida itu lewat driver ojol, Bandiman (47), tanpa melalui aplikasi.

Namun, orang yang berada di rumah Tomy saat itu menolak menerima paket makanan tersebut, karena merasa tak mengenali pengirimnya.

Makanan itu kemudian diberikan ke Bandiman. Bandiman yang tak curiga membawa pulang sate beracun itu dan disantap bersama keluarganya di rumah. ● lus



## PEMUSNAHAN NARKOTIKA DI POLDA BALI

Polisi memperlihatkan berbagai jenis psikotropika saat konferensi pers hasil pengungkapan kasus narkotika di Mapolda Bali, Denpasar, Bali, Kamis (6/5). Ditretnarkoba Polda Bali memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan selama periode 1 April-6 Mei 2021 berupa sabu-sabu 748,13 gram netto, ganja 1.850,59 gram netto, tembakau gorila 253 gram netto, ekstasi 1.800 butir, ekstasi serbuk 37,24 gram netto, psikotropika 67.410 butir dengan jumlah tersangka 71 orang.